

### **Wow, Hampir 100% Penduduk Papua Barat Dijamin Jaminan Kesehatan Nasional**

Manokwari, (05/12/2022) - Pemerintah Provinsi Papua Barat kembali menegaskan komitmennya dalam memastikan jaminan kesehatan kepada seluruh warganya melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal tersebut dibuktikan dengan tercapainya Universal Health Coverage (UHC) sebesar 99,07% penduduk Provinsi Papua Barat telah menjadi peserta. Konsistensi Pemerintah Propinsi Papua Barat untuk menyelesaikan program pemerintah telah ditunjukkan sejak 2018 dan bertahan hingga saat ini.

Sebagai wujud apresiasi atas komitmen tersebut, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati dengan didampingi oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari Deny Jermy Eka Putra Mase menyerahkan Piagam Penghargaan UHC kepada Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, Senin (05/12). Selain itu juga telah diteken Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja UHC Program JKN antara BPJS Kesehatan Kedeputusan Wilayah Papua dan Papua Barat dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Pemberian penghargaan ini terkait penetapan Provinsi Papua Barat yang telah mencapai UHC Program JKN atas tercapainya kepesertaan JKN sebanyak 1.150.186 jiwa atau 99,07%, dari total penduduk 1.161.028 jiwa. Capaian tersebut bahkan melebihi target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mana ditargetkan minimal 98% penduduk terlindungi JKN di tahun 2024.

“Papua Barat ini merupakan Provinsi keempat dari seluruh Provinsi di Indonesia setelah NAD, DKI Jakarta dan Bengkulu. Capaian UHC ini tentu bukan akhir dari segalanya, lebih dari itu kami sangat memerlukan dukungan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan jumlah kepesertaan JKN agar penduduk semakin terlindungi jaminan kesehatannya. Selain itu peran serta Pemda dalam peningkatan sarana layanan kesehatan sangat diperlukan agar ke depannya masyarakat yang berobat dapat terlayani di daerahnya sehingga tidak perlu dirujuk ke luar Papua Barat,” pungkas Lily.

Sementara itu, Paulus Waterpauw menyampaikan bahwa pencapaian UHC ini adalah berkat kerja sama semua pihak dalam mendukung program jaminan kesehatan nasional. Kepastian jaminan kesehatan menyeluruh bagi rakyat itu sudah sepenuhnya juga menjadi tanggung jawab bersama terutama penyelenggara negara di daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah.

Pemprov Papua Barat terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yang belum terjamin layanan kesehatannya khususnya di daerah yang jauh dari wilayah perkotaan karena dinilai belum punya kesadaran akan pentingnya perlindungan jaminan kesehatan.

Ditambahkannya, melalui kerja sama UHC Pemerintah Propinsi Papua Barat dengan BPJS Kesehatan, maka seluruh warga Papua Barat dapat memanfaatkan layanan kesehatan. Jika dalam kondisi sakit cukup menunjukkan KTP, langsung bisa berobat ke Puskesmas atau jika dalam kondisi kegawatdaruratan bisa mengakses IGD rumah sakit, dan sudah terjamin oleh BPJS Kesehatan sesuai prosedur yang berlaku.

“Untuk itu atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat, saya mengharapkan dukungan dari semua pihak termasuk Kepala Daerah Kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Barat untuk menyelesaikan program strategis nasional secara khusus di bidang kesehatan yang mana memerlukan kerja keras, perencanaan yang benar-benar dimonitor dan dikawal sebaik-baiknya,” tutup Waterpauw.

Untuk meningkatkan upaya sosialisasi terkait Program JKN, BPJS Kesehatan juga telah menyediakan berbagai saluran informasi dan penanganan pengaduan. Masyarakat bisa mengakses BPJS Kesehatan Care Center 165, media sosial resmi BPJS Kesehatan, maupun mengakses petugas BPJS SATU di rumah sakit. Selain itu, BPJS Kesehatan juga terus memperluas kanal pendaftaran dan administrasi kepesertaan baik dengan tatap muka maupun tanpa tatap muka seperti Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) 08118165165.

Peserta juga dapat mengakses Aplikasi Mobile JKN dengan berbagai fitur yang mempermudah peserta mengakses layanan secara mandiri. Saat ini juga peserta dapat menggunakan KTP Elektronik/NIK untuk mengakses layanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun di rumah sakit.

Informasi lebih lanjut hubungi:  
**Humas BPJS Kesehatan**  
BPJS Kesehatan Kantor Pusat  
Care Center : 165  
[www.bpjs-kesehatan.go.id](http://www.bpjs-kesehatan.go.id)

**PRESS RELEASE****Wow, Nearly 100% of West Papua's Population is Guaranteed by National Health Insurance**

Manokwari, (05/12/2022) - The Provincial Government of West Papua has reaffirmed its commitment to ensuring health insurance for all its citizens through the National Health Insurance Program (JKN) through the achievement of Universal Health Coverage (UHC). There are 99.07% of the total population of West Papua Province have become participants. The consistency of the Provincial Government of West Papua in the success of government programs has been demonstrated since 2018 and has persisted to date.

As a form of appreciation for this commitment, Director of BPJS Kesehatan Healthcare Service Assurance Lily Kresnowati accompanied by Head of BPJS Kesehatan Manokwari Branch Deny Jermy Eka Putra Mase handed over the UHC Award Certificate to Acting Governor of West Papua Paulus Waterpauw, Monday (05/12). In addition, a Memorandum of Understanding and Work Plan for the UHC JKN Program were signed between the BPJS Kesehatan Deputy for Papua and West Papua Regions and the Provincial Government of West Papua.

This award is to appreciate the determination of West Papua Province which has reached the UHC JKN program with a figure of citizens who have become participants 1,150,186 people or 99.07%, of the total population. This achievement even exceeds the target of the National Medium-Term Development Plan (RPJMN), which targets a minimum of 98% of the population to be protected by JKN in 2024.

"West Papua is the fourth province of all provinces in Indonesia after NAD, DKI Jakarta, and Bengkulu who has achieved UHC. This achievement is certainly not the end of everything. We still need the support of the Provincial Government of West Papua to maintain and increase the number of JKN participants so that the population is increasingly protected by health insurance. In addition, we also need the participation of the regional government in improving health service facilities. Therefore, people who seek treatment can be served in their area and they do not need to be referred outside West Papua," concluded Lily.

Meanwhile, Paulus Waterpauw said that the achievement of UHC was due to the cooperation of all parties in supporting the national health insurance program. Comprehensive health insurance for the people is also a shared responsibility, especially for state administrators in the regions, in this case, the Regional Government.

The West Papua Provincial Government continues to outreach the people who are not registered in the health insurance program, especially those who are far from urban areas because they are considered to have no awareness of the importance of health insurance protection.

He added, through the UHC collaboration between the Provincial Government of West Papua and BPJS Kesehatan, all West Papuans can take advantage of health services. If people are sick, it is enough to show their identity card, and they can immediately go to the Puskesmas for treatment. If they are in an emergency, they can access the emergency room at the hospital, and this is guaranteed by BPJS Kesehatan according to the applicable procedures.

"For this reason, on behalf of the Provincial Government of West Papua, I hope for support from all parties, including the Heads of Districts/Cities in the Province of West Papua to make the national strategic program successful, specifically in the health sector, which requires hard work, planning that is really monitored and guarded as well as possible," concluded Waterpauw.

To increase socialization related to the JKN Program, BPJS Kesehatan has also provided various information channels and complaint handling. The public can access the BPJS Kesehatan Care Center 165, the official social media for BPJS Kesehatan, as well as access BPJS SATU officers at the hospital. In addition, BPJS Kesehatan also continues to expand membership registration and administration channels, both face-to-face and non-face-to-face, such as Administrative Services via WhatsApp (PANDAWA) 08118165165.

Participants can also access the Mobile JKN Application with various features that make it easier for participants to access services independently. Currently, participants can also use their Electronic Identity Card/NIK to access services at First Level Health Facilities (FKTP) and in hospitals.